

Regional Fiscal In Brief

Vol X/Desember/2025

ALCo

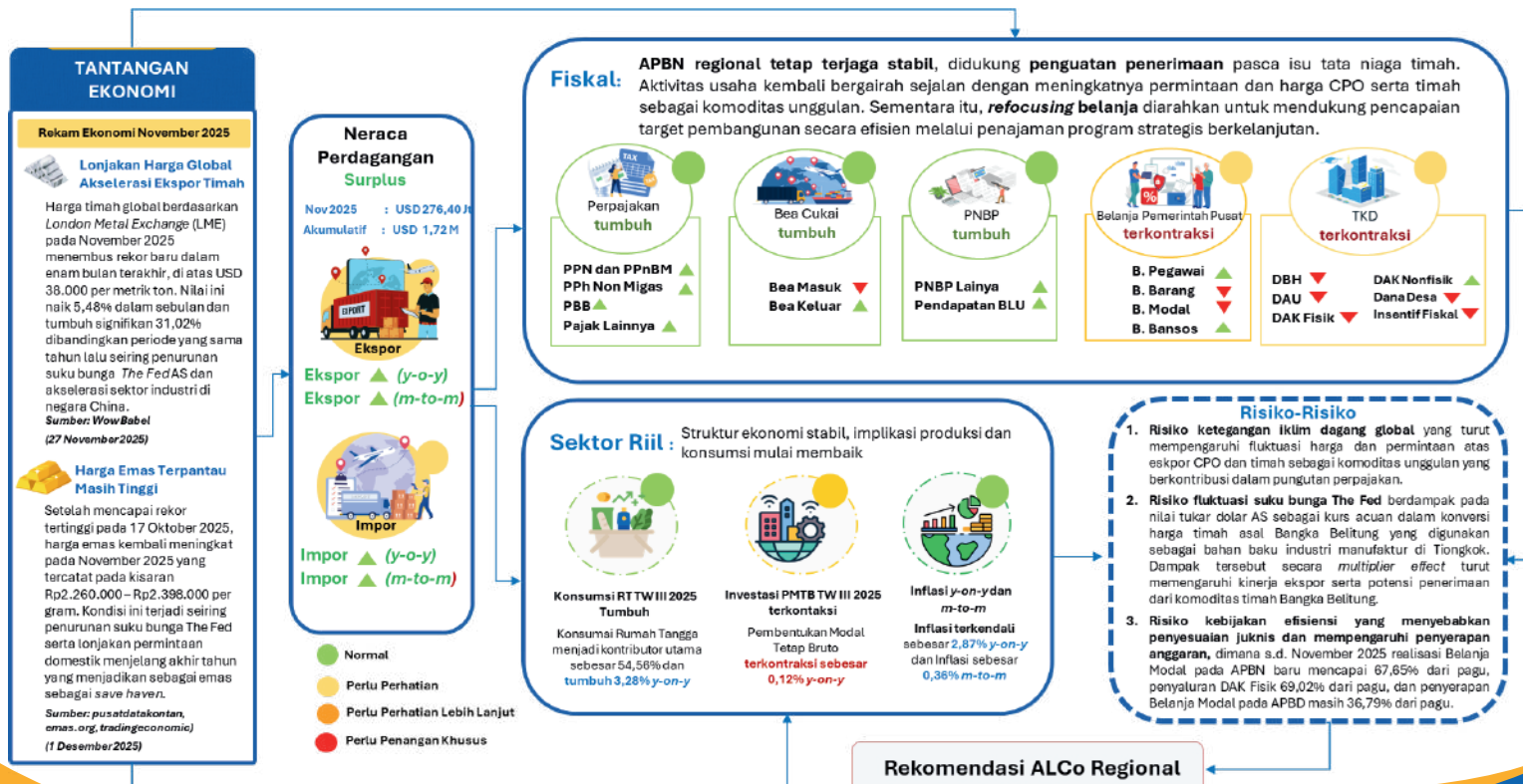
Provinsi Bangka
Belitung

EXECUTIVE SUMMARY

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 3,12 persen *y-on-y*, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,13 persen. Pemulihan ini tidak terlepas dari perbaikan kondisi pasca kasus tata niaga timah pada tahun 2024 yang sempat mengguncang berbagai sektor potensial. Iklim usaha yang lebih kondusif di tahun 2025 menjadi penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh signifikan 13,77 persen, yang didorong oleh terselenggaranya program MBG. Di sisi lain Industri Pengolahan juga tumbuh positif seiring produksi CPO dan turunannya yang mengalami peningkatan. Selain itu, Perikanan menjadi kontributor terbesar Lapangan Usaha Pertanian, yang tumbuh seiring peningkatan ekspor produk perikanan. Produk perkebunan tahunan seperti kelapa sawit dan karet juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, inflasi Kepulauan Bangka Belitung pada November 2025 mencapai 2,87 *y-on-y*, seiring kenaikan harga komoditas emas perhiasan, cabai merah, dan cumi-cumi.

Dari sisi fiskal, hingga akhir November 2025, Pendapatan Negara tumbuh 22,91 persen *y-on-y* dan Belanja Negara turun 8,32 persen *y-on-y*. Kebijakan *refocusing* anggaran mendorong perlambatan Belanja Pemerintah Pusat terutama Belanja Barang dan Belanja Modal, serta TKD. Untuk mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif di daerah, Belanja APBN masih didominasi Transfer ke Daerah yang mencapai 70,91 persen dari total belanja negara. Di sisi lain, realisasi pendapatan dan belanja APBD konsolidasian turun masing-masing sebesar 4,34 persen dan 16,61 persen *y-on-y*.

Strategic Dashboard



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

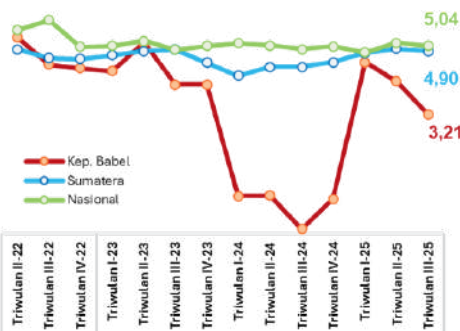
Pertumbuhan Ekonomi



c-to-c
3,95
persen

y-on-y
3,21
persen

q-t-q
-1,70
persen

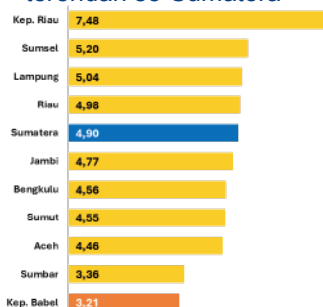


Secara y-on-y lebih rendah dari Sumatera & Nasional

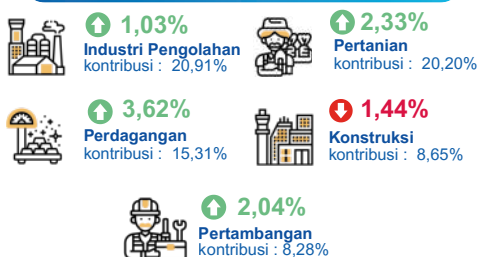
Sumatera ➡ **4,90%**
Nasional ➡ **5,04%**

Ekonomi Babel terjaga dengan konsumsi masyarakat yang kuat di tengah transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan efisiensi

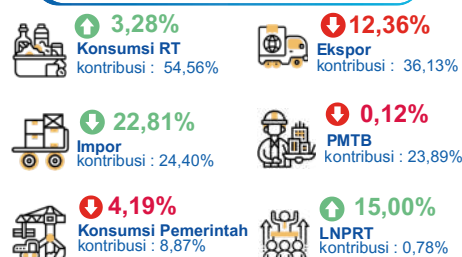
Laju Ekonomi Babel terendah se-Sumatera



PDRB LAPANGAN USAHA - TW III 2025



PDRB PENGELUARAN - TW III 2025



Inflasi

y-on-y
2,87
persen

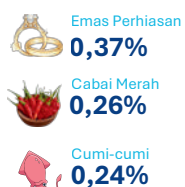
m-to-m
0,36
persen

y-to-d
2,21
persen

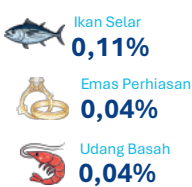


Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi y-on-y dengan peningkatan indeks sebesar 7,30% pada November 2025

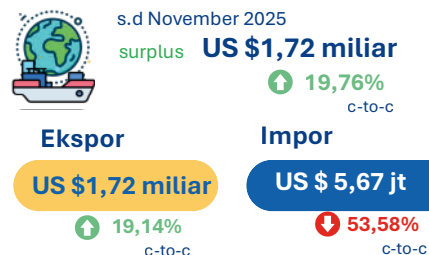
Komoditas Penyumbang Inflasi (y-o-y)



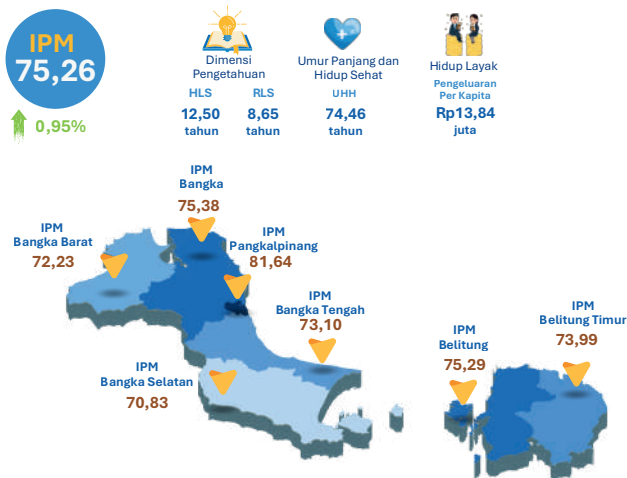
Komoditas Penyumbang Inflasi (m-to-m)



Neraca Perdagangan



Indikator Kesejahteraan



IPM Babel 2025 sebesar 75,26 termasuk kategori tinggi.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya, baik untuk Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, maupun Pengeluaran Riil per Kapita.

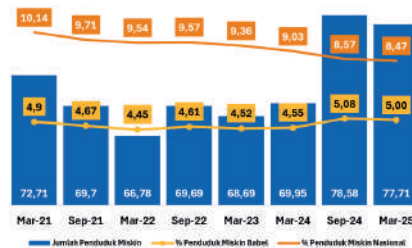
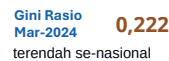


Tingkat kemiskinan Babel Maret 2025 sebesar 5,00 persen. Capaian tersebut terendah keempat secara nasional.

NTP Nov-25



NTN Nov-25



Highlight KINERJA APBN

s.d. 30 November 2025

Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah efisiensi Belanja Negara

I-Account APBN Kep. Bangka Belitung

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara

Rp3,37 T

▲ 22,91% yoy

- Kontribusi **Penerimaan Perpajakan** mendominasi sebesar **92,73 persen** dari total Pendapatan Negara.

Belanja Negara

Rp8,63 T

▼ 8,32% yoy

- Belanja negara didominasi TKD yaitu sebesar **70,91 persen**.

Defisit Anggaran

Rp5,26 T

Pendapatan Negara

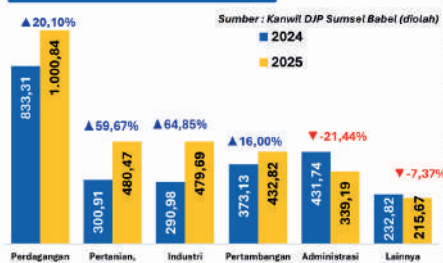
- **Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak** berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp1.000,84 M) dan tumbuh 20,10%. Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh signifikan 64,85% seiring tumbuhnya pembayaran setoran masa PPN pada sektor sawit dan timah.
- **Bea Keluar mendominasi** dalam postur Bea Cukai sebesar 98,35%. Penerimaan November sebesar Rp20,34 miliar, yang didukung oleh realisasi Bea Keluar yang sangat tinggi atas ekspor Produk Turunan CPO (RBD *Palm Olein*).
- Kontribusi terbesar **PNBP** bersumber dari PNBP Lainnya, khususnya Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, yang didukung oleh peningkatan pendapatan STNK dan BPKB pada sater Kepolisian, seiring dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Belanja Negara

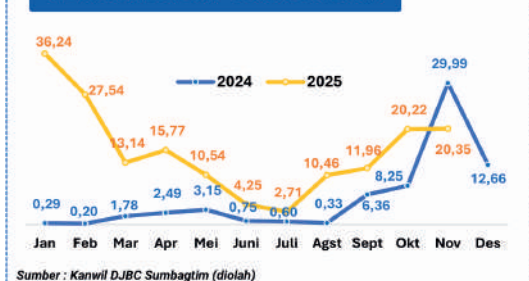
- **Belanja Barang** dan **Belanja Modal** terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi, terutama belanja barang non operasional dan peradilan serta berakhirnya masa Pemilu. Penurunan belanja modal terutama pada jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum turun 72,30% karena penurunan pagu dan masih rendahnya realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Penyaluran komponen **TKD** telah mencapai lebih dari 90% kecuali realisasi DAK Fisik yang baru mencapai 69,02% dari pagu karena beberapa proyek pembangunan masih dalam proses pengerjaan hingga akhir November 2025. Capaian TKD pada Pemda di regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah tersalurkan di atas 90% dari pagu kecuali Kota Pangkalpinang (87,71%).

Uraian	2024			2025			% Growth	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
a	b	c	c/b	e	f	f/e		
A. Pendapatan Negara	3.659,50	2.739,13	74,85%	3.602,07	3.366,72	93,47%	▼ -1,57%	▲ 22,91%
I. Penerimaan Dalam Negeri	3.659,50	2.739,13	74,85%	3.602,07	3.366,72	93,47%	▼ -1,57%	▲ 22,91%
1. Penerimaan Perpajakan	3.511,98	2.517,09	71,67%	3.438,95	3.121,86	90,78%	▼ -2,08%	▲ 24,03%
a. Pajak Dalam Negeri	3.448,10	2.463,05	71,43%	3.426,35	2.949,08	86,07%	▼ -0,63%	▲ 19,73%
Pajak Penghasilan Non Migas	1.591,18	876,25	55,07%	1.260,27	1.223,58	97,09%	▼ -20,80%	▲ 39,64%
Pajak Pertambahan Nilai	1.726,64	1.534,01	88,84%	2.133,67	1.572,48	73,70%	▲ 23,57%	▲ 2,51%
Pajak Bumi dan Bangunan	101,10	52,63	52,05%	32,20	58,95	176,85%	▼ -88,15%	▲ 8,21%
Cukai	-	0,15	0,00%	-	0,39	0,00%	▲ 0,00%	▲ 160,93%
Pajak Lainnya	29,18	0,01	0,04%	0,20	95,67	47.232%	▼ -99,31%	▲ 928,287%
b. Pajak Perdagangan Internasional	63,88	54,04	84,60%	12,60	172,79	1.371%	▼ -80,27%	▲ 219,71%
Bea Masuk	5,29	5,23	98,82%	2,25	2,47	109,93%	▼ -57,48%	▼ -52,71%
Bea Keluar	58,59	48,81	83,32%	10,35	170,31	1.645%	▼ -82,33%	▲ 248,90%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,52	222,04	150,51%	163,12	244,86	150,11%	▲ 10,57%	▲ 10,28%
Pendapatan PNBP Lainnya	97,24	176,43	181,44%	109,34	187,37	171,37%	▲ 12,44%	▲ 6,20%
Pendapatan Badan Layanan Umum	50,28	45,61	90,71%	53,78	57,49	106,90%	▲ 6,96%	▲ 26,05%
B. Belanja Negara	10.473,50	9.412,76	89,87%	9.721,43	8.629,47	88,77%	▼ -7,18%	▼ -8,32%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.702,96	2.929,76	79,12%	3.142,48	2.510,16	79,88%	▼ -15,14%	▼ -14,32%
Belanja Pegawai	1.303,92	1.196,52	91,76%	1.401,63	1.320,05	94,18%	▲ 7,49%	▲ 10,32%
Belanja Barang	1.776,39	1.303,91	73,40%	1.308,00	894,08	68,35%	▼ -28,37%	▼ -31,43%
Belanja Modal	614,48	422,79	68,81%	422,95	286,13	67,65%	▼ -31,17%	▼ -32,32%
Belanja Bantuan Sosial	8,18	6,53	79,84%	9,90	9,90	100,00%	▲ 20,97%	▲ 51,52%
II. Transfer ke Daerah	6.770,54	6.483,00	95,75%	6.578,95	6.119,31	93,01%	▼ -2,83%	▼ -5,61%
a. Dana Perimbangan	6.377,05	6.093,43	95,55%	6.207,97	5.766,34	92,89%	▼ -2,85%	▼ -5,37%
1) Dana Bagi Hasil	644,78	618,22	95,88%	565,54	523,74	92,61%	▼ -12,29%	▼ -15,28%
2) Dana Alokasi Umum	4.369,34	4.314,95	98,76%	4.384,56	4.149,56	94,64%	▲ 0,35%	▼ -3,83%
3) Dana Alokasi Khusus	1.362,92	1.160,26	85,13%	1.257,87	1.093,03	86,90%	▼ -7,71%	▼ -5,79%
- DAK Fisik	493,77	395,44	80,09%	302,65	208,89	69,02%	▼ -38,71%	▼ -47,18%
- DAK Nonfisik	869,15	764,81	88,00%	955,22	884,14	92,56%	▲ 9,90%	▲ 15,60%
b. Insentif Fiskal	98,10	95,26	97,10%	71,82	71,82	100,00%	▼ -26,79%	▼ -24,61%
c. Dana Desa	295,39	294,32	99,64%	299,17	281,16	93,98%	▲ 1,28%	▼ -4,47%
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	- 6.813,99	- 6.673,63	97,94%	- 6.119,36	- 5.262,75	86,00%	▼ -10,19%	▼ -21,14%

Realisasi Pajak per Sektor



Realisasi Bea dan Cukai Per Bulan



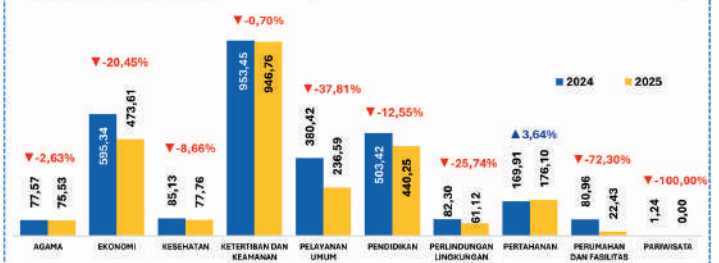
Realisasi PNBP

PNBP Lainnya
Rp187,37 M
▲ 6,20% (yoy)

PNBP BLU
Rp57,49 M
▲ 26,05% (yoy)

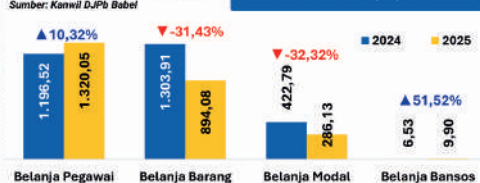
Sumber: Kanwil DJPb Babel

Sumber: Kanwil DJPb Babel



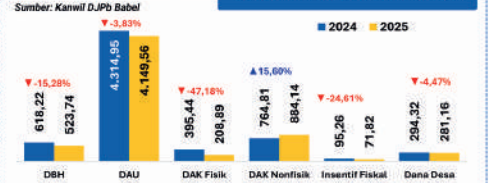
Sumber: Kanwil DJPb Babel

Realisasi Belanja per Jenis



Sumber: Kanwil DJPb Babel

Realisasi Transfer ke Daerah



Highlight KINERJA APBD

s.d. 30 November 2025

I-Account APBD Konsolidasian

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Daerah Konsolidasi

Rp7,12 T

▼ 4,34% yoy

- Kontribusi **Pendapatan dari Dana Transfer** masih mendominasi sebesar **75,97 persen** dari total Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah Konsolidasi

Rp6,39 T

▼ 16,61% yoy

- Kontribusi Belanja Daerah didominasi dari **Belanja Operasi** sebesar **85,20 persen**.

Surplus Anggaran

Rp730,35 M

URAIAN	2024			2025			
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	% Growth
A. Pendapatan	9.040,35	7.443,41	82,34%	8.795,66	7.120,24	80,95%	▼-4,34%
I. Pendapatan Asli Daerah	1.880,43	1.483,32	78,88%	2.105,00	1.690,63	80,32%	▲13,98%
- Pajak Daerah	1.271,42	1.046,69	82,32%	1.372,71	1.085,23	79,06%	▲3,68%
- Retribusi Daerah	266,82	110,52	41,42%	445,38	405,75	91,10%	▲267,12%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54,36	52,81	97,14%	55,09	43,94	79,76%	▼-16,79%
- Lain-Lain PAD yang Sah	287,83	273,30	94,95%	231,81	155,71	67,17%	▼-43,03%
II. Pendapatan dari Dana Transfer	7.117,78	5.959,61	83,73%	6.660,96	5.409,07	81,21%	▼-9,24%
III. Lain - lain Pendapatan Daerah	42,13	0,48	1,14%	29,70	20,54	69,15%	▲4.160,07%
B. Belanja Daerah dan Transfer	9.885,63	7.662,49	77,51%	9.578,99	6.389,89	66,71%	▼-16,61%
I. Belanja Operasi	8.021,21	6.269,26	78,16%	7.877,93	5.443,95	69,10%	▼-13,16%
- Belanja Pegawai	4.168,05	3.581,98	85,94%	4.579,27	3.347,20	73,09%	▼-6,55%
- Belanja Barang dan Jasa	3.374,49	2.285,98	67,74%	3.038,90	1.903,27	62,63%	▼-16,74%
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	▲0,00%
- Belanja Subsidi	2,57	1,66	64,86%	2,18	1,48	67,88%	▼-11,14%
- Belanja Hibah	454,61	384,21	84,51%	235,17	178,51	75,91%	▼-53,54%
- Belanja Bantuan Sosial	21,49	15,44	71,83%	22,42	13,50	60,19%	▼-12,57%
II. Belanja Modal	1.143,22	707,22	61,86%	920,78	338,75	36,79%	▼-52,10%
III. Belanja Tidak Terduga	29,37	4,15	14,13%	88,16	4,21	4,78%	▲1,49%
IV. Transfer Pemerintah Daerah	691,82	681,86	98,56%	692,12	602,97	87,12%	▼-11,57%
- Transfer/Bagi Hasil ke Desa	41,17	82,18	199,61%	48,38	61,25	126,61%	▼-25,47%
- Transfer Bantuan Keuangan	650,65	599,68	92,17%	643,74	541,72	84,15%	▼-9,66%
C. Surplus/Defisit Anggaran	-845,27	-219,08	25,92%	-783,33	730,35	-93,24%	▼-433,37%
D. Pembiayaan Daerah	845,27	621,91	73,57%	706,59	252,58	35,75%	▼-59,39%
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	934,44	697,20	74,61%	790,70	305,13	38,59%	▼-56,23%
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	89,17	75,29	84,44%	84,11	52,55	62,48%	▼-30,21%
SILPA		402,83			982,94		▲144,01%

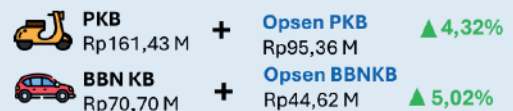
- Secara kumulatif, **Pendapatan Asli Daerah** didominasi oleh Pajak Daerah dengan kontribusi 64,19%, dan tumbuh sebesar 3,68% didorong peningkatan PBBKB karena kebijakan pemutihan pajak kendaraan.
- Kinerja **Retribusi Daerah** tumbuh positif dan signifikan sebesar 267,12% yoy yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja seluruh komponen retribusi daerah dan reklasifikasi pendapatan BLUD Kesehatan ke Retribusi Jasa Umum.
- Lain-lain PAD yang Sah** turun akibat reklasifikasi, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada komponen Pendapatan dari Pengembalian dan Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, serta Pendapatan dari Pengembalian.

- Belanja Pegawai** turun 6,55% yoy karena kontraksi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah. Sedangkan sebagian besar komponen belanja lainnya mengalami pertumbuhan.
- Belanja Barang dan Jasa** melambat 16,74% yoy sebagai akibat turunnya kinerja Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Kantor.
- Belanja Modal** terkontraksi cukup dalam sebesar 52,10% yang didominasi oleh penurunan Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Gedung, dan Belanja Modal Bangunan Air.

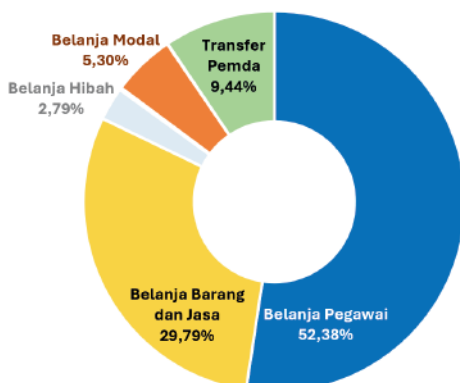
KINERJA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU



TOP 5 PAJAK DAERAH



Proporsi Belanja Daerah dan Transfer



Belanja lainnya

- Belanja Bansos 0,21%
- BTT 0,07%
- Belanja Subsidi 0,02%

Kemandirian Fiskal Bangka Belitung Tercatat Rendah



- IKF Babel hingga masih stabil dan tumbuh dibandingkan kondisi November 2024.
- Berdasarkan kriteria, IKF tersebut masih berada pada kategori **Belum Mandiri** (0,00–0,25).
- Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Dalam hal ini, Pemda masih sangat bergantung pada Dana Transfer, mengingat **PAD baru dapat membiayai sekitar 26,46%** dari total Belanja Daerah.



Manfaat

Mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang setara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.



Pagu Belanja

- Terdapat **tagging** pagu belanja **Rp704.688.000,00** melalui satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian PUPR.
- **Realisasi s.d. Nov 2025 sebesar Rp88.744.500,00** untuk kegiatan Survei Topografi Sekolah Rakyat Tahap II Kab. Bangka Tengah.



Progress

- ✓ Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur telah mengajukan proposal dan kelengkapan dokumen lainnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial. Pembangunan gedung dan fasilitas lainnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan umum.
- ✓ Secara administratif, seluruh persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, mulai dari proposal usulan, penetapan lokasi, surat pernyataan bupati, hingga sertifikat lokasi. Dari sisi teknis, dokumen kajian Andalalin, KKPR, aksesibilitas, serta sumber dan mutu air baku juga telah disusun dan dilengkapi.
- ✓ UKL/UPL, PBG, dan dokumen pendukung lainnya masih dalam proses dan menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian PUPR.

Perkembangan Program Strategis Sekolah Rakyat



Kendala

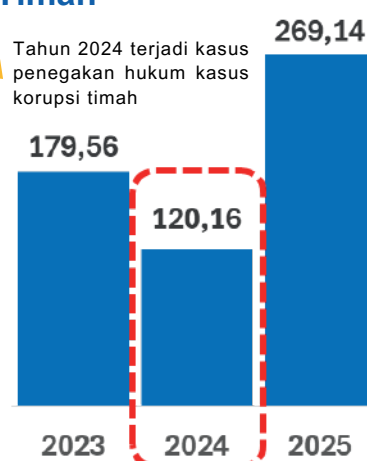
- Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan SR adalah adanya AMDAL yang membutuhkan biaya yang besar yang sulit dipenuhi dari APBD Kabupaten.
- Selama ini pengusulan SR dilakukan langsung dari Kab/Kota ke Kemensos. Diperlukan koordinasi di level Provinsi untuk memantau progress pembangunan SR di seluruh wilayah Provinsi Kep. Babel.

Kebangkitan Aktivitas Usaha Pasca Kasus Tata Niaga Timah Dorong Penerimaan Pajak

Jenis Pajak	2023	2024	2025	Growth 25 vs 24
PPh Pasal 25/29 Badan	147.24	94.97	196.96	107.4%
PBB Pertambangan Minerba	21.88	42.50	26.66	-37.3%
PPh Pasal 21	57.05	37.74	55.51	47.1%
PPh Pasal 23	47.57	19.67	27.98	42.2%
PPh Final & FLN	2.96	3.21	15.35	377.9%
PPh Pasal 22	3.88	2.18	35.62	1534.9%
PPh Pasal 26	2.94	1.25	2.34	88.2%
PPN Impor	7.42	1.16	1.11	-4.6%
PPN DN dan Lainnya	-111.37	-82.52	-92.40	-12.0%
Jumlah	179.56	120.16	269.14	124.0%



Tahun 2024 terjadi kasus penegakan hukum kasus korupsi timah



- Penerimaan pajak dari sektor timah (KLU 07291 dan 07292) **tumbuh positif sebesar 123,98 persen** pasca kasus korupsi tata niaga timah di tahun 2024.
- Penerimaan hingga akhir November 2025 mencapai mencapai Rp269,14 miliar seiring dengan upaya **perbaikan tata kelola timah dan penertiban tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung**.



PENGENDALIAN INFLASI:

- Pemerintah daerah bersama TPID dapat menetapkan target penurunan inflasi pangan sensitif sebesar 1–1,5 poin persentase dalam dua bulan melalui optimalisasi operasi pasar murah pada komoditas beras, cabai, dan bawang dengan volume minimal 10–15% dari kebutuhan mingguan.
- Penguatan pasokan dapat dicapai dengan memperluas kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas rawan khususnya beras dan hortikultura dengan target peningkatan suplai masuk sebesar 20% pada periode tekanan harga.
- Pengendalian biaya distribusi melalui subsidi ongkos angkut untuk sentra-sentra yang terganggu cuaca ditargetkan mampu menurunkan harga di tingkat konsumen sebesar 3–5%, sementara peningkatan cadangan pangan daerah minimal sampai 1,5 kali rata-rata bulanan dapat memperkuat stabilitas harga di akhir tahun.



PENINGKATAN EKONOMI

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pemerintah dapat menargetkan peningkatan kontribusi sektor non-tambang minimal +1–1,5 poin persentase terhadap PDRB dalam dua tahun melalui:

- Ekspansi hilirisasi lada, perikanan, dan logam non-timah.
- Meningkatkan realisasi belanja modal di Triwulan III sebesar 20–25% agar mampu menahan pola kontraksi musiman.
- Mendorong pertumbuhan UMKM 8–10% per tahun melalui program digitalisasi dan pembiayaan berbasis KUR.
- Menambah kapasitas ekspor komoditas olahan dengan target kenaikan volume sebesar 5–7% per tahun.
- Melakukan percepatan penyelesaian infrastruktur logistik dan kawasan industri dengan target mencapai minimal 80% progres tahunan, sehingga dapat mendorong produktivitas dan menarik lebih banyak investasi baru yang berdampak langsung pada peningkatan output daerah.



LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN

- Satker perlu berkoordinasi dengan eselon I terkait penyelesaian realisasi belanja yang melebihi pagu (pagu minus) seperti pada lingkup Polda.
- Kanwil beserta KPPN perlu mengantisipasi dan memonitor penggunaan RPATA dalam penyelesaian pekerjaan kontraktual.
- Seluruh pihak diharapkan *aware* atas tanggal-tanggal LLAT beserta batas penyelesaian administrasi menjelang akhir tahun.



APBN regional tetap terjaga stabil, didukung penguatan penerimaan pasca isu tata niaga timah. Aktivitas usaha kembali bergairah sejalan dengan meningkatnya permintaan dan harga CPO serta timah sebagai komoditas unggulan. Sementara itu, refocusing belanja diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara efisien melalui penajaman program strategis berkelanjutan.

